

Studi Perbandingan Efektivitas Program Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Dan Singapura

Yessi Juwita Lestari Saragih^a, Timbul Dompok^b

^a Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam, Kota Batam

pb221010038@upbatam.ac.id

Abstract

Social welfare is an important aspect in ensuring a decent life and security for society. Each country has different approaches and strategies in efforts to improve social welfare. This research aims to compare the effectiveness of social welfare programs in Indonesia and Singapore through a literature review study. By identifying and analyzing various literature from scientific journals, books, government reports, and international publications, this research disseminates government policies and regulations, budget allocations, community participation, benefit distribution systems, social and economic impacts, as well as cultural and social factors that influence success of social welfare programs in both countries. The research results show that Singapore has a well-coordinated policy framework and adequate budget allocation, which supports the effectiveness of its social welfare programs. In contrast, Indonesia faces challenges in terms of policy coordination and budget constraints, which hinder the success of social welfare programs. This research provides recommendations for Indonesia to improve coordination between programs, strengthen budget allocations, increase community participation, improve the benefit distribution system, and consider cultural factors in program implementation. For Singapore, this research suggests continuing to maintain a strong policy framework, ensuring funding continuity, and strengthening private sector and community participation. This study provides valuable insights for policy makers in designing and implementing more effective and sustainable social welfare programs.

Keywords: *Comparison, Effectiveness, Social Welfare, Indonesia, Singapore.*

1. Pendahuluan

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat. Setiap negara memiliki pendekatan dan strategi yang berbeda dalam mengupayakan kesejahteraan sosial bagi warganya.

Di tengah perkembangan ekonomi global yang dinamis, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan program-program yang efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indonesia dan Singapura, sebagai negara-negara yang memiliki kedekatan geografis dan kemitraan ekonomi, menawarkan perspektif

Perbandingan efektivitas program kesejahteraan sosial. Meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda, kedua negara ini memiliki komitmen yang kuat dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan populasi penduduk yang besar. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah distribusi kesejahteraan yang masih belum merata di seluruh wilayah. Sebagian besar penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan

infrastruktur yang memadai.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai program kesejahteraan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Program Indonesia Pintar (PIP), untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Di sisi lain, Singapura, sebagai negara kota yang maju dan berpendapatan tinggi, telah menjadi kiblat dalam pencapaian kesejahteraan sosial yang tinggi. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan ketergantungan pada sektor jasa dan industri, Singapura telah berhasil membangun sistem kesejahteraan sosial yang komprehensif melalui berbagai program, seperti Central Provident Fund (CPF), Public Housing Scheme, dan skema asuransi kesehatan yang terjangkau. Pendekatan Singapura dalam memberikan akses yang setara terhadap layanan kesehatan, perumahan, dan pendidikan telah menjadi model bagi negara-negara lain. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam studi ini antara lain:

- a) Kebijakan dan Regulasi Pemerintah. Peran pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan program kesejahteraan sosial sangat penting. Evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi yang mendukung program-program tersebut dapat memberikan wawasan terhadap efektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat.
- b) Alokasi Anggaran dan Pendanaan. Ketersediaan anggaran yang memadai dan keberlanjutan pendanaan merupakan factor krusial dalam menjamin keberhasilan program kesejahteraan sosial. Analisis terhadap alokasi anggaran dan sumber pendanaan di kedua negara dapat memberikan gambaran tentang prioritas dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- c) Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Stakeholder. Keterlibatan aktif masyarakat dan stakeholder terkait, seperti program kesejahteraan sosial. Studi ini dapat menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam mencapai tujuan program.
- d) Sistem Penyaluran dan Distribusi Manfaat. Efektivitas program kesejahteraan sosial bergantung pada sistem penyaluran dan distribusi manfaat yang tepat sasaran. Evaluasi terhadap mekanisme penyaluran, identifikasi penerima manfaat, dan pemantauan distribusi dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan program dalam menjangkau kelompok sasaran.
- e) Dampak Sosial dan Ekonomi. Penilaian terhadap dampak sosial dan ekonomi dari program kesejahteraan sosial menjadi penting untuk mengukur efektivitasnya. Analisis dapat dilakukan dengan melihat indikator-indikator seperti tingkat kemiskinan, akses terhadap layanan dasar, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- f) Faktor Budaya dan Sosial. Faktor budaya dan sosial yang unik di masing-masing negara dapat mempengaruhi penerimaan dan keberhasilan program kesejahteraan sosial. Studi ini dapat mengeksplorasi bagaimana budayawan norma sosial.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literature review untuk membandingkan efektivitas program kesejahteraan sosial di Indonesia dan Singapura. Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi literatur relevan dari jurnal, buku, laporan pemerintah, dan publikasi internasional. Kriteria inklusi dan eksklusi ditentukan untuk memilih literatur yang relevan, kemudian pencarian dilakukan

melalui database seperti Google Scholar, PubMed, dan JSTOR dengan kata kunci terkait. Setelah literatur terkumpul, dilakukan evaluasi kritis terhadap validitas, reliabilitas, dan kontribusi masing-masing sumber. Data dianalisis dengan membandingkan temuan studi-studi tersebut untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan dalam efektivitas program kesejahteraan di kedua negara. Hasilnya disintesis untuk memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas program kesejahteraan sosial di Indonesia dan Singapura serta menyarankan praktik terbaik dan kebijakan yang dapat diadopsi.

3. Hasil dan Pembahasan

Perbandingan Efektivitas Kebijakan dan Regulasi. Salah satu faktor kunci yang membedakan efektivitas program kesejahteraan sosial di Indonesia dan Singapura adalah kebijakan dan regulasi pemerintah.

Singapura di kerangka kebijakan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik dalam menangani isu-isu kesejahteraan sosial. Misalnya, dalam bidang perumahan Singapura menerapkan program Housing Development Board (HDB) yang menyediakan hunian terjangkau bagi semua warga negara, termasuk skema subsidi dan bantuan pinjaman bagi yang kurang mampu (Lee, 2018). Di sisi lain, **Indonesia** menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dan implementasi kebijakan yang efektif di tingkat nasional dan daerah. Meskipun terdapat program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), namun sering kali terjadi tumpang tindih dan kurangnya sinergi antara program-program tersebut.

Alokasi Anggaran dan Pendanaan Ketersediaan anggaran yang memadai dan keberlanjutan pendanaan merupakan aspek penting dalam menentukan efektivitas program kesejahteraan sosial. Singapura dikenal memiliki kemampuan fiskal yang kuat, dengan alokasi anggaran yang signifikan untuk program-program kesejahteraan sosial. Sebagai contoh, pemerintah Singapura mengalokasikan sekitar 20% dari anggaran tahunan untuk sektor kesehatan dan pendidikan (Singapura Departemen Statistik, 2022).

Sebaliknya, Indonesia menghadapi keterbatasan anggaran dan sering kali bergantung pada bantuan luar negeri atau pinjaman untuk mendanai program-program kesejahteraan sosial. Menurut data dari Kementerian Keuangan Indonesia, hanya sekitar 5% dari anggaran negara yang dialokasikan untuk program-program kesejahteraan sosial (Kementerian Keuangan Indonesia, 2021).

Keterbatasan ini dapat menghambat implementasi dan keberlanjutan program-program tersebut. Di Singapura, terdapat kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Misalnya, program Community Chest yang dikelola oleh National Council of Social Service (NCSS) melibatkan partisipasi aktif dari perusahaan-perusahaan dan individu dalam mengumpulkan dana untuk mendukung program-program sosial (NCSS, 2021).

Di Indonesia, partisipasi masyarakat dan keterlibatan stakeholder masih belum optimal. Meskipun terdapat upaya untuk melibatkan organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga masyarakat, namun seringkali terjadi kesenjangan antara perencanaan dan implementasi program di lapangan. Kurangnya koordinasi dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu kendala dalam mencapai efektivitas program.

Sistem Penyaluran dan Distribusi Manfaat Efektivitas program kesejahteraan sosial bergantung pada sistem penyaluran dan distribusi manfaat yang tepat sasaran. Di Singapura, pemerintah menerapkan sistem yang efisien dan terkoordinasi dalam menyalurkan bantuan dan manfaat kepada kelompok sasaran. Misalnya, dalam program Central Provident Fund (CPF), pemerintah menggunakan sistem yang terintegrasi untuk mengumpulkan kontribusi dari pekerja dan pemberi kerja, serta mendistribusikan manfaat seperti dana pensiun, asuransi kesehatan, dan tabungan perumahan (CPF Board, 2021).

Di Indonesia, kendala utama yang dihadapi adalah masalah penyaluran dan distribusi manfaat yang tidak merata. Dalam program-program seperti PKH dan PNPM, sering terjadi keluhan tentang penerima manfaat yang tidak tepat sasaran atau adanya penyalahgunaan dana (Sumarto & Bazzi, 2019). Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif, serta masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat local.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Penilaian terhadap dampak sosial dan ekonomi dari program kesejahteraan sosial menjadi penting untuk mengukur efektivitasnya. Di Singapura, program-program kesejahteraan sosial telah terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tingkat kemiskinan di Singapura sangat rendah, hanya sekitar 5% dari populasi (Departemen Statistik Singapura, 2022).

Selain itu, Singapura juga memiliki akses yang luas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan di Indonesia, dampak program-program kesejahteraan sosial masih belum

optimal. Meskipun terdapat penurunan angka kemiskinan, namun masih terdapat kesenjangan yang besar antara masyarakat kaya dan miskin. Sekitar 9,8% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2022). Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan juga masih menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedesaan.

Faktor Budaya dan Sosial

Faktor budaya dan sosial yang unik di masing-masing Negara dapat mempengaruhi penerimaan dan keberhasilan program kesejahteraan sosial. Di Singapura, budaya meritokrasi dan etos kerja yang kuat menjadi landasan dalam mendukung program-program kesejahteraan sosial. Masyarakat Singapura menghargai nilai-nilai seperti kemandirian, tanggung jawab individu, dan kontribusi terhadap masyarakat (Tan, 2012).

Di Indonesia, faktor budaya yang beragam dan norma sosial yang berbeda-beda di setiap daerah dapat menjadi tantangan dalam implementasi program kesejahteraan sosial. Selain itu, masalah seperti korupsi dan nepotisme yang mengakar di masyarakat juga dapat menghambat efektivitas program-program tersebut.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas program kesejahteraan sosial di Indonesia dan Singapura:

- a) Perlunya peningkatan koordinasi dan sinergi antar program kesejahteraan sosial di Indonesia. Pemerintah perlu memperkuat kerangka kebijakan dan regulasi yang terintegrasi untuk dari tumpang tindih dan memastikan efektivitas implementasi program.
- b) Komitmen meningkatkan alokasi anggaran bagi program-program kesejahteraan sosial di Indonesia. Pemerintah dapat mengeksplorasi sumber-sumber pendanaan alternatif, seperti kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi non pemerintah, untuk mendukung keberlanjutan pendanaan program.
- c) Memperkuat system penyaluran dan distribusi manfaat dengan menerapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa program-program kesejahteraan sosial mencapai kelompok sasaran yang tepat dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana.
- d) Melakukan evaluasi berkala terhadap dampak sosial dan ekonomi dari program-program kesejahteraan sosial. Evaluasi ini

dapat memberikan wawasan tentang efektivitas program.

- e) Pendekatan yang kontekstual dan sensitif terhadap budaya setempat dapat meningkatkan penerimaan dan keberhasilan program di masyarakat.

Sementara itu, bagi Singapura, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas program kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan: bagi Singapura, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas program kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan:

- a) Terus memelihara kerangka kebijakan dan regulasi yang solid serta kesinambungan program-program kesejahteraan sosial yang telah terbukti efektif.
- b) Memastikan alokasi anggaran yang memadai dan keberlanjutan pendanaan untuk program-program kesejahteraan sosial, termasuk dengan mengeksplorasi sumber-sumber pendanaan alternatif.
- c) Mempromosikan keterlibatan yang lebih besar dari sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung program-program kesejahteraan sosial, seperti melalui inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan atau kegiatan sukarela.
- d) Terus memperkuat sistem penyaluran dan distribusi manfaat dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.
- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap dampak sosial dan ekonomi dari program-program kesejahteraan sosial, serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau inovasi.

Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa **Singapura** telah berhasil mengembangkan program kesejahteraan sosial yang efektif melalui kebijakan yang terkoordinasi dengan baik, alokasi anggaran yang memadai, dan sistem penyaluran manfaat yang efisien. Singapura juga berhasil melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder dalam implementasi program-program tersebut, serta mempertimbangkan faktor budaya dan sosial yang relevan. Sebaliknya, **Indonesia** menghadapi beberapa tantangan signifikan dalam meningkatkan efektivitas program kesejahteraan sosialnya. Tantangan tersebut meliputi koordinasi kebijakan yang kurang optimal, keterbatasan anggaran, sistem penyaluran manfaat yang tidak selalu tepat sasaran, serta partisipasi masyarakat dan stakeholder yang masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor ini menghambat upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan

ketimpangan sosial secara menyeluruh. Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi diusulkan untuk meningkatkan efektivitas program kesejahteraan sosial di Indonesia, termasuk memperkuat koordinasi antar program, meningkatkan alokasi anggaran, memperbaiki sistem penyaluran manfaat, dan memperhitungkan faktor budaya dalam implementasi program. Bagi Singapura, disarankan untuk terus memelihara kerangka kebijakan yang solid, memastikan keberlanjutan pendanaan.

Daftar Pustaka

- Cristy, R., Boer, R. F., & Kusumadewi, R. I. (2022). Pemenuhan Kebutuhan Informasi Program-Program Kesejahteraan Sosial oleh Kementerian Sosial bagi Masyarakat. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(3).
- Hasanah, B. S. (2015). Efektivitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Pelaksanaan Program Perluasan dan Percepatan Perlindungan Sosial (P4S) di Kota Surakarta (Studi Kasus Kecamatan Pasar Kliwon).
- Iriansyah, H. S. (2020). Krisis Asia, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan (Tinjauan Analisis Kapitalisme Korea Selatan). *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 12(1), 53-60
- Kholis, N. (2015). Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(2), 243-260.
- Notowidagdo, R. (2022). Pengantar Kesejahteraan Sosial: berwawasan man antakwa. *Amzah*.
- Nurdin, N. (2023). Kesejahteraan Sosial dalam Persepektif Demokrasi dan Otoritarian: Analisis Perbandingan Inggris dan Singapura. *PARAPOLITIK A: Journal of Politic sand Democracy Studies*, 4(2), 140-167.
- Rachma, M., Hidayat, Y., & Azkia, L. (2022). Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin. *PADARINGA N (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 4(2), 93-104.
- Sari, I. F., & Sanjani, M. R. I. (2023). Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1080-1087
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 3(3).
- Setiawan, H. H. (2019). Merumuskan indeks kesejahteraan sosial (IKS) di Indonesia.
- Sofianto, A. (2020). Implementasi program keluarga harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio*

- Konsepsia: Jurnal
Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan
Sosial, 10(1), 14-31.
- Suhendi, A. (2013). Peranan tokoh masyarakat
lokal dalam pembangunan kesejahteraan
sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan
Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 18(2)
- Syafri, U. A., Maya, R. R., Rahman, I. K., Tamam,
A. M., & Taib, E. B. M. (2022). Implementasi
Penguatan Karakter Religius di Panti Jompo
Singapura. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan
Islam*, 11(03), 973-996
- Syofyan, Y., & Gusman, D. (2023). Studi
Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Antara
Indonesia Dan Malaysia Dalam Rangka
Pemenuhan Hak Kesehatan di Indonesia.
UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 208-219.
- Utami, K. (2019). Studi perbandingan perlindungan
hak penyandang disabilitas di Indonesia dan
wilayah Asia Tenggara. *Jurnal Polinter: Kajian
Politik dan Hubungan Internasional*, 4(2), 36-47
- Wahyuningsih, W. (2018). Millenium developent
goals (Mdgs) Dan sustainable development
goals (Sdgs) dalam kesejahteraan sosial.
BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 11(3),
390-399.
- Witono, T. (2020). Pembangunan Sosial,
Kesejahteraan Sosial, dan Pekerjaan Sosial.
Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial,
16(1), 57-72.